

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara berkembang berbentuk kepulauan yang memiliki banyak sekali penduduk. Tercatat pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia mencapai 273.000.000 (273-juta) jiwa dan terus bertambah setiap tahunnya. Persoalan yang dihadapi saat ini yaitu tingginya angka penduduk menjadi sebuah tantangan untuk bangsa Indonesia dalam menyediakan pangan bagi para penduduknya. Kebijakan pembangunan pertanian yang dibuat saat ini akan menentukan apakah Indonesia mampu memenuhi ketersediaan pangan dimasa depan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena sektor ini memiliki fungsi sebagai penyedia pangan nasional. Hal ini menjadikan pertanian menjadi sektor yang sangat vital bagi sebuah negara. Banyak sekali isu yang menjadi tantangan bagi sektor pertanian dalam penyediaan pangan, mulai dari lahan yang berkurang, perubahan iklim, politik, hingga sumber daya manusia. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anggota dewan Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN) Marsudi Wahyu Kisworo dalam forum Geliat Ketahanan Pangan Indonesia melalui Tempo (2023), bahwa terdapat 5 (lima) tantangan Indonesia dalam hal ketahanan pangan yaitu iklim, pandemik, geopolitik, pertumbuhan penduduk, dan regenerasi petani dan nelayan.

Di Indonesia, terdapat tiga tujuan pembangunan pertanian yaitu, menyediakan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan ekspor. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan sumber daya pertanian yang professional dan mampu bersaing di kancah global. Sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan menjadi modal bagi sebuah bangsa. maka dari itu, sumber daya manusia harus terus-menerus diperhatikan kualitasnya agar memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan zaman yang terus berubah-ubah setiap saat. Hal tersebut mengingat bahwa sumber daya manusia di sektor pertanian memerlukan keahlian khusus dan menjadi tumpuan bangsa guna penyediaan pangan yang terbatas. Salah satu cara yang dapat dilakukan guna menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui sebuah pendidikan atau pelatihan.

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk merubah dan mengembangkan perilaku maupun pengetahuan. Menurut Saleh dkk (2020, hlm.3), pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan secara terstruktur dan terencana. Dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, dan memiliki akhlak yang mulia. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, disebutkan bahwa:

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Menurut *UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization)*, dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa tidak ada cara lain yang dapat ditempuh kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. kemudian, *UNESCO* dalam Priscilla (2021) menetapkan empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan, yaitu a). *Learning to Know*, b). *Learning to do*, c). *Learning to be*, dan d). *Learning to Live Together*. Untuk itu, tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan wadah untuk mengembangkan kepribadian serta potensi diri dalam meningkatkan kualitas seseorang melalui pendidikan itu sendiri.

Pendidikan memiliki tiga subsistem yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan yang biasa kita ketahui melalui sekolah SD, SMP, SMA, Universitas, dan seterusnya disebut dengan pendidikan formal, sedangkan pendidikan informal dan non-formal, masuk kepada ranah Pendidikan Masyarakat yang dapat dilakukan secara berjenjang. Contohnya PKBM, Lembaga pelatihan, Lembaga bimbingan belajar, Sanggar, Taman Baca Masyarakat, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 3 tentang pendidikan non-formal, disebutkan bahwa:

“Pendidikan non-formal meliputi Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan, serta Pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.”

Pendidikan Masyarakat memiliki fungsi sebagai pelengkap, penambah, bahkan menjadi pengganti dari pendidikan formal. Umumnya, kegiatan Pendidikan Masyarakat diselenggarakan atas dasar kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini dan masa yang akan datang. Dalam pelayanan pendidikan masyarakat, terdapat apa yang disebut dengan pelatihan. Satuan pelatihan diadakan untuk melayani sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhannya dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan sikap.

Pelatihan merupakan salah satu kegiatan pendidikan yang sengaja dilakukan dengan upaya untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan peserta dalam menguasai suatu kompetensi yang tidak dimiliki sebelumnya. Kemudian pelatihan juga memberikan pengalaman belajar yang dirancang agar para peserta dapat segera menggunakan hasil pelatihan tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut senada dengan pandangan Walter Dick dalam Pribadi (2020, hlm 2) bahwa

“a prespecified and planned experience that enable a person to do something that he or she could not do before”

Pelatihan merupakan pengalaman belajar dirancang untuk dapat membantu seseorang mampu melakukan sesuatu yang tidak mereka miliki sebelumnya. Kemudian Menurut Mathis dalam Cahya, dkk (2021) mengemukakan bahwa pelatihan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik untuk peserta serta dapat digunakan dalam pekerjaan mereka saat itu juga.

Program pelatihan perlu diselenggarakan untuk memperoleh sumber daya manusia yang handal. Oleh karena itu, program pelatihan dipandang sebagai sebuah investasi yang berharga untuk digunakan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang potensial agar mampu menghadapi arus perubahan nasional hingga global.

Pelatihan Berbasis Kompetensi (*Competency Based Training*) atau yang biasa dikenal dengan PBK/CBT muncul sebagai inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Dalam jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS, Septia Landa (2021) menyebut bahwa Pelatihan Berbasis Kompetensi merupakan suatu inovasi dari *Technical Vocational Education and Training* (TVET) baik di Eropa, Australia, maupun Asia. Menurut Hatta, dkk (2023, hlm 222) Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pelatihan yang dilakukan untuk mendapat keterampilan berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Pelatihan Berbasis Kompetensi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat dan efisien untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mencapai kompetensi yang bermanfaat. Pelatihan Berbasis Kompetensi memiliki tujuan untuk mendapatkan kompetensi sumber daya manusia dengan standar kompetensi tertentu. Kompetensi tersebut bisa saja terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural seperti di instansi pemerintahan, atau kompetensi umum. Adapun menurut Lusanda (2012) Pelatihan Berbasis Kompetensi lebih mengutamakan pembelajaran praktik yang disesuaikan dengan keadaan pekerjaan. Penyelenggaraannya berfokus pada (*outcome*) atau hasil akhir dengan waktu yang bervariasi untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.

Salah satu lembaga milik pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan dan diklat dibidang pertanian adalah Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang (BBPP Lembang). Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang (BBPP Lembang) sebagai lembaga pelatihan merupakan salah satu lembaga milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1962 dan terus berkembang secara konsisten yang hingga saat ini menyelenggarakan berbagai program pendidikan non-formal terutama pelatihan dibidang pertanian. BBPP Lembang mempunyai tugas melaksanakan diklat keahlian dan pengembangan teknik diklat dibidang agribisnis hortikultura dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, dan terus melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, kemudian mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional serta teknis di bidang pertanian bagi aparatur maupun non aparatur pertanian (Kemenaker, 2020).

Salah satu pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPP Lembang guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanian adalah Pelatihan Penyuluh Pertanian Terampil. Adapun pelatihan ini ditunjukan bagi para Aparatur dibidang pertanian atau ASN dilingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pelatihan ini diselenggarakan penuh secara luring di BBPP Lembang yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pelatihan serta kebutuhan para peserta pelatihan. Pada kurikulum penyelenggaraan, terdapat ujian tertulis yang harus dilakukan oleh para peserta. Apabila hasil ujian yang dilakukan oleh para peserta tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka penyelenggara akan mengadakan remedial sebanyak satu kali. Kemudian sebelum penyelenggaraan pelatihan ditutup, terdapat agenda bagi para peserta untuk mengisi Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang mana nantinya akan dimonitor dalam jangka waktu tertentu oleh panitia penyelenggara pelatihan yaitu pihak BBPP Lembang itu sendiri.

Penelitian sebelumnya yang relevan mengenai Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) atau *Competency Based Training (CBT)* berasal dari Marselina Lusanda (2012) dengan judul “Penerapan Sistem Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Pada Departemen Teknologi Informatika Dalam Meningkatkan Kompetensi Peserta Pelatihan”. Penelitian tersebut, Lusanda memaparkan mengenai penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi itu sendiri. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah dimana Lusanda mendeskripsikan mengenai efektivitas pelatihan dengan sistem Pelatihan Berbasis Kompetensi, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan kali ini akan lebih menggali terkait hasil belajar peserta yang nampak terus meningkat namun fluktuatif pada tiap pelatihan dasar fungsional penyuluh pertanian terampil ini diselenggarakan disetiap tahunnya.

Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil diselenggarakan selama 21 (dua puluh satu) hari sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dibidang pertanian. Adapun konteks kompetensi yang dimaksud pada konteks pelatihan ini adalah kompetensi atau keterampilan sebagai penyuluh pertanian tingkat terampil sesuai dengan apa yang tertuang dalam SKKNI yang telah dirumuskan dengan melibatkan berbagai lapisan SDM

dibidang pertanian. Dalam penyelenggaraannya, terdapat agenda praktik kompetensi pada hari ke-13 s.d hari ke-20 atau selama 7 (tujuh) hari yang dilaksanakan diluar lingkungan BBPP Lembang. Pelatihan ini diselenggarakan oleh BBPP Lembang dibawah naungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil angkatan pertama ditahun 2023. Pelatihan ini diikuti oleh kurang lebih 30 orang yang berasal dari beberapa Provinsi yang meliputi wilayah kerja BBPP Lembang setidaknya meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Selama melakukan studi peninjauan, peneliti menemukan bahwa dalam penyelenggaraan pelatihan ini para peserta diangkat sebelumnya selalu mendapatkan hasil yang menunjukkan adanya peningkatan kompetensi setelah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan ini. Kompetensi yang dimaksud adalah hasil belajar berdasarkan Permentan No. 37 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 10 yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hasil belajar tersebut terukur dari *pre-test* dan *post-test*, evaluasi sikap, dan keterampilan sebagai penyuluh pertanian tingkat terampil yang dilakukan oleh para peserta saat sebelum pelatihan diselenggarakan, saat pelatihan diselenggarakan dan setelah pelatihan diselenggarakan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui terkait bagaimana proses model Pelatihan Berbasis Kompetensi yang diimplementasikan melalui Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil di BBPP Lembang dan seperti apa peran model Pelatihan Berbasis Kompetensi ini dalam meningkatkan hasil belajar para peserta pelatihan tersebut. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Model Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar (*Output*) Peserta Pelatihan (Studi Deskriptif Pada Program Pelatihan Penyuluh Pertanian Terampil di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti berhasil mengidentifikasi beberapa poin permasalahan, yaitu:

- a) Dibutuhkannya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pertanian yang kompeten guna mendukung peran sektor pertanian
- b) Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil menerapkan sistem Pelatihan Berbasis Kompetensi dan sudah diselenggarakan selama beberapa tahun terakhir guna meningkatkan kompetensi para peserta pelatihan. Dalam penelitian ini, kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi sebagai penyuluh pertanian tingkat terampil.
- c) Peserta pelatihan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang bersifat heterogen yang berasal dari berbagai daerah serta memiliki latar belakang yang beragam.
- d) Dalam penyelenggaraannya, terdapat peningkatan kompetensi yang diperoleh oleh para peserta pelatihan setelah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian rumusan masalah yang dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

- a) Bagaimana penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang?
- b) Bagaimana hasil belajar (*output*) peserta Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang?
- c) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk :

- a) Menganalisis penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi pada Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil di BBPP Lembang
- b) Menganalisis hasil belajar (*output*) peserta Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil di BBPP Lembang
- c) Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil di BBPP Lembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan suatu manfaat yang dapat diambil baik secara teoritis maupun praktis. Berikut ini merupakan beberapa manfaat dilakukannya penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Menambah dan mengembangkan keilmuan dalam bidang Pendidikan Masyarakat terutama mengenai fokus program pelatihan
 - b) Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi patokan hingga referensi bagi penelitian lainnya dimasa yang akan datang
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini memberikan manfaat dalam meningkatkan pandangan ilmu mengenai penyelenggaraan program pelatihan terutama dengan model pelatihan berbasis kompetensi
 - b. Bagi pembaca, dapat memberikan manfaat dalam bentuk informasi terkait konsep keilmuan mengenai penyelenggaraan program pelatihan terutama dengan model pelatihan berbasis kompetensi
 - c. Bagi lembaga, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan perbaikan dan memunculkan inovasi guna meningkatkan layanan pelatihan dimasa yang akan datang

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Penyusunan tulisan dari penelitian ini mengacu pada ketentuan aturan sistematika penulisan skripsi atau tugas akhir dalam Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2021 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bagian ini memuat pengenalan bagi pembaca yang berisi: Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat / Signifikansi Penelitian, dan Struktur Organisasi Skripsi.

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini memuat konteks yang jelas tentang teori-teori mengenai Pelatihan, Kompetensi, Pelatihan Berbasis Kompetensi, Hasil Belajar, dan Konsep Pendidikan Masyarakat berdasarkan bidang-bidang yang dikaji melalui studi terdahulu yang relevan dengan pokok masalah penelitian, landasan hukum tertentu, beserta turunannya.

3. BAB III: METODE

Pada bagian ini memuat terkait procedural penelitian yang mana berisi mengenai Desain Penelitian, Tahapan Penelitian, Partisipan dan Lokasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Tahapan Analisis Data, dan Triangulasi Data

4. BAB IV: HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan pemaparan hasil-hasil dari penelitian yang kemudian dibahas dengan teori-teori yang relevan. Pada bagian ini memuat Profil Lembaga, Identitas Informan, Deskripsi Hasil Lapangan, dan Hasil Pembahasan Penelitian.

5. BAB V: SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada Bagian ini disajikan Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian sekaligus memaparkan hal-hal yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.

